



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR : 060 / 097 / 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TEGAL
DAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2019 - 2024

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024, serta Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 37B Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

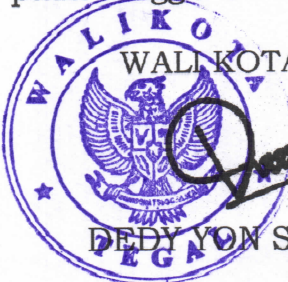
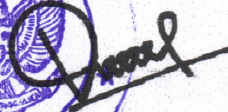
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 37B Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perencanaan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Walikota Tegal Nomor 061 / 138 / 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 01 November 2019


WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Tegal;
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR : 060 / 097 / 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TEGAL DAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TEGAL**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																																
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>> 90 - 100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>> 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>> 50 - 60</td> <td>Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>> 30 - 50</td> <td>Kurang, perlu banyak perbaikan & perubahan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>> 0 - 30</td> <td>Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : - Sekretariat Daerah - Inspektorat</p>	No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi	1.	AA	> 90 - 100	Istimewa	2.	A	> 80 - 90	Memuaskan	3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	5.	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6.	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan & perubahan yang mendasar	7.	D	> 0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar
No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi																																	
1.	AA	> 90 - 100	Istimewa																																	
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan																																	
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik																																	
4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan																																	
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																																	
6.	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan & perubahan yang mendasar																																	
7.	D	> 0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar																																	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN										
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	<p>Alasan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1432 440 2305 699"> <thead> <tr> <th data-bbox="1432 440 1809 492">PREDIKAT</th> <th data-bbox="1809 440 2305 492">MAKNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1432 492 1809 544">WTP</td> <td data-bbox="1809 492 2305 544">Wajar Tanpa Pengecualian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1432 544 1809 596">WDP</td> <td data-bbox="1809 544 2305 596">Wajar Dengan Pengecualian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1432 596 1809 647">TMT/Disclaimer</td> <td data-bbox="1809 596 2305 647">Tidak Memberikan Pendapat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1432 647 1809 699">TW/Adverse Opinion</td> <td data-bbox="1809 647 2305 699">Tidak Wajar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>	PREDIKAT	MAKNA	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian	WDP	Wajar Dengan Pengecualian	TMT/Disclaimer	Tidak Memberikan Pendapat	TW/Adverse Opinion	Tidak Wajar
PREDIKAT	MAKNA													
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian													
WDP	Wajar Dengan Pengecualian													
TMT/Disclaimer	Tidak Memberikan Pendapat													
TW/Adverse Opinion	Tidak Wajar													
2.	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	<p>Alasan : Salah satu Survey Eksternal kelengkapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Formulasi Pengukuran : Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (Skala 0 – 4) <i>Nilai rata – rata 6 (enam) unsur Perilaku Anti Korupsi</i></p> <p>Keterangan :</p> <p>6 (enam) unsur Perilaku Anti Korupsi yaitu :</p> <table data-bbox="1358 1209 2068 1323"> <tbody> <tr> <td>1. Integritas</td> <td>4. Imbalan</td> </tr> <tr> <td>2. Diskriminasi</td> <td>5. Pungli</td> </tr> <tr> <td>3. Kecurangan</td> <td>6. Calo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Inspektorat</p>	1. Integritas	4. Imbalan	2. Diskriminasi	5. Pungli	3. Kecurangan	6. Calo				
1. Integritas	4. Imbalan													
2. Diskriminasi	5. Pungli													
3. Kecurangan	6. Calo													

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1360 516 2382 748"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : - Sekretariat Daerah - OPD Pelayanan Publik</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									
4.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	<p>Alasan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1642 1065 2095 1357"> <thead> <tr> <th>NILAI</th> <th>KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 39,9</td> <td>Tidak Informatif</td> </tr> <tr> <td>40 – 59,9</td> <td>Kurang Informatif</td> </tr> <tr> <td>60 – 79,9</td> <td>Cukup Informatif</td> </tr> <tr> <td>80 – 89,9</td> <td>Menuju Informatif</td> </tr> <tr> <td>90 – 100</td> <td>Informatif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal</p>	NILAI	KATEGORI	< 39,9	Tidak Informatif	40 – 59,9	Kurang Informatif	60 – 79,9	Cukup Informatif	80 – 89,9	Menuju Informatif	90 – 100	Informatif													
NILAI	KATEGORI																												
< 39,9	Tidak Informatif																												
40 – 59,9	Kurang Informatif																												
60 – 79,9	Cukup Informatif																												
80 – 89,9	Menuju Informatif																												
90 – 100	Informatif																												

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
5.	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik	Potensi Konflik Sosial Teratasi	Kejadian	<p>Alasan : Kondusivitas masyarakat dan wilayah Kota Tegal sebagai penunjang pelaksanaan kelanjutan pembangunan di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Potensi konflik sosial teratasi}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja - Polres Tegal Kota
6.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	<p>Alasan : Salah satu Indikator SDGs</p> <p>Formulasi Pengukuran : $IPG = \frac{1}{3} [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$</p> <p>Keterangan :</p> <p>$X_{ede(1)}$ = X_{ede} untuk harapan hidup $X_{ede(2)}$ = X_{ede} untuk harapan pendidikan $I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Pusat Statistik Kota Tegal

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Alasan : Salah satu Indikator SDGs</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IPM = \frac{1}{3} [(X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)})]$ <p>Keterangan : $X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup $X_{(2)}$ = Indeks pendidikan $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3} (\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3} (\text{indeks rata - rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak</p> $\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{X_{(i)maks} - X_{(i)min}}$ <p>Keterangan : $X_{(i)}$ = Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(i)min}$ = Nilai minimum $X_{(i)}$ $X_{(i)maks}$ = Nilai maksimum $X_{(i)}$</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Tegal</p>
8.	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	<p>Alasan : Indikator makro ekonomi untuk mengetahui kondisi kemiskinan masyarakat Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $P\alpha = \frac{1}{n} + \sum_{n-1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Keterangan :</p> <p>a = 0</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Badan Pusat Statistik Kota Tegal
9.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	<p>Alasan :</p> <p>Indikator makro ekonomi untuk mengetahui jumlah pengangguran terbuka di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Badan Pusat Statistik Kota Tegal
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	%	<p>Alasan :</p> <p>Indikator ini untuk menunjukkan luasan permukiman yang layak huni di wilayah Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		<p>Alasan : Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Formulasi Pengukuran : $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 30\%)$ </p> <p>Keterangan : IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
12.	Meningkatnya kinerja infrastruktur dasar perkotaan	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui capaian kinerja infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Rata – rata capaian kinerja infrastuktur dasar (wilayah bebas genangan/banjir, sanitasi layak dan air minum layak)</i></p> <p>Sumber Data : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Tingkat pelayanan lalu lintas (<i>Level of Service</i>)	Kategori	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																					
				<p>Formulasi Pengukuran :</p> $LoS = \frac{V}{C}$ <p>Keterangan :</p> <p><i>LoS</i> = Level of Service <i>V</i> = Volume kendaraan <i>C</i> = Kapasitas jalan</p> <table border="1" data-bbox="1358 537 2379 995"> <thead> <tr> <th data-bbox="1358 537 1535 591">TINGKAT PELAYANAN</th> <th data-bbox="1535 537 1796 591">RASIO V/C</th> <th data-bbox="1796 537 2379 591">KARAKTERISTIK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1358 591 1535 678">A</td> <td data-bbox="1535 591 1796 678">< 0,60</td> <td data-bbox="1796 591 2379 678">Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1358 678 1535 766">B</td> <td data-bbox="1535 678 1796 766">0,60 < V/C < 0,70</td> <td data-bbox="1796 678 2379 766">Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat kebebasan dalam memilih kecepatannya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1358 766 1535 820">C</td> <td data-bbox="1535 766 1796 820">0,70 < V/C < 0,80</td> <td data-bbox="1796 766 2379 820">Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1358 820 1535 857">D</td> <td data-bbox="1535 820 1796 857">0,80 < V/C < 0,90</td> <td data-bbox="1796 820 2379 857">Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1358 857 1535 911">E</td> <td data-bbox="1535 857 1796 911">0,90 < V/C < 1</td> <td data-bbox="1796 857 2379 911">Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1358 911 1535 995">F</td> <td data-bbox="1535 911 1796 995">> 1</td> <td data-bbox="1796 911 2379 995">Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan, pada waktu yang cukup lama</td> </tr> </tbody> </table>	TINGKAT PELAYANAN	RASIO V/C	KARAKTERISTIK	A	< 0,60	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki	B	0,60 < V/C < 0,70	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat kebebasan dalam memilih kecepatannya	C	0,70 < V/C < 0,80	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas	D	0,80 < V/C < 0,90	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah	E	0,90 < V/C < 1	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas	F	> 1	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan, pada waktu yang cukup lama
TINGKAT PELAYANAN	RASIO V/C	KARAKTERISTIK																							
A	< 0,60	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki																							
B	0,60 < V/C < 0,70	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat kebebasan dalam memilih kecepatannya																							
C	0,70 < V/C < 0,80	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas																							
D	0,80 < V/C < 0,90	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah																							
E	0,90 < V/C < 1	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas																							
F	> 1	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan, pada waktu yang cukup lama																							
14.	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui realisasi ketaatan fasilitas wilayah / infrastruktur terhadap rencana peruntukannya</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>																					

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
15.	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	<p>Alasan : Indikator makro ekonomi</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $LPE = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><i>LPE</i> = Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>PDRB₁</i> = PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) pada suatu tahun <i>PDRB₀</i> = PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) pada tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Tegal</p>
16.	Meningkatnya penanaman modal dan kemudahan berusaha	Nilai investasi	Triliun Rupiah	<p>Alasan : Indikator makro ekonomi untuk mengetahui perkembangan nilai investasi di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p><i>Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan</i></p> <p>Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
17.	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Persentase Wirausaha Muda	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui cakupan pemuda yang memanfaatkan peluang usaha di Kota Tegal melalui kewirausahaan</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
18.	Berkembangnya budaya daerah seni	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui potensi perkembangan Kota Tegal sebagai Kota Pusaka</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Capaian faktor penunjang Kota Pusaka}}{\text{Jumlah seluruh faktor penunjang Kota Pusaka}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>



 WALIKOTA TEGAL,

 DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR : 060 / 097 / 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TEGAL DAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 - 2024**

1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN										
1.	Meningkatnya kualitas dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	<p>Alasan : Salah satu Survey Eksternal kelengkapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah</p> <p>Formulasi Pengukuran : Hasil Survey Persepsi Pelayanan Publik (Skala 0 – 4) <i>Nilai rata – rata 9 (sembilan) unsur Kualitas Pelayanan Publik</i></p> <p>Keterangan : 9 (sembilan) unsur Kualitas Pelayanan Publik yaitu :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Prosedur</td> <td>6. Respon</td> </tr> <tr> <td>2. Persyaratan</td> <td>7. Performa</td> </tr> <tr> <td>3. Biaya</td> <td>8. Sarana</td> </tr> <tr> <td>4. Waktu</td> <td>9. Pengaduan</td> </tr> <tr> <td>5. Penyelesaian</td> <td></td> </tr> </table>	1. Prosedur	6. Respon	2. Persyaratan	7. Performa	3. Biaya	8. Sarana	4. Waktu	9. Pengaduan	5. Penyelesaian	
1. Prosedur	6. Respon													
2. Persyaratan	7. Performa													
3. Biaya	8. Sarana													
4. Waktu	9. Pengaduan													
5. Penyelesaian														

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																																
				<p>Sumber Data : Bagian Organisasi</p>																																
		<p>Nilai SAKIP</p>	<p>Nilai</p>	<p>Alasan : Pengukuran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1390 740 2344 1089"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai absolut</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup Baik (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Bagian Organisasi</p>	No.	Predikat	Nilai absolut	Interprestasi	1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2	A	>80-90	Memuaskan	3	BB	>70-80	Sangat Baik	4	B	>60-70	Baik , perlu sedikit perbaikan	5	CC	>50-60	Cukup Baik (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6	C	>30-50	Agak Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	7	D	0-30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
No.	Predikat	Nilai absolut	Interprestasi																																	
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																	
2	A	>80-90	Memuaskan																																	
3	BB	>70-80	Sangat Baik																																	
4	B	>60-70	Baik , perlu sedikit perbaikan																																	
5	CC	>50-60	Cukup Baik (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																																	
6	C	>30-50	Agak Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar																																	
7	D	0-30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar																																	
		<p>Nilai LPPD</p>	<p>Nilai</p>	<p>Alasan : Pengukuran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>																																

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN										
				<p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1540 350 2202 529"> <thead> <tr> <th data-bbox="1540 350 1871 386">NILAI</th> <th data-bbox="1871 350 2202 386">KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1540 386 1871 422">3,00 – 4,00</td> <td data-bbox="1871 386 2202 422">ST (Sangat Tinggi)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1540 422 1871 457">2,00 – 3,00</td> <td data-bbox="1871 422 2202 457">T (Tinggi)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1540 457 1871 493">1,00 – 2,00</td> <td data-bbox="1871 457 2202 493">S (Sedang)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1540 493 1871 529">0,00 – 1,00</td> <td data-bbox="1871 493 2202 529">R (Rendah)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah</p>	NILAI	KATEGORI	3,00 – 4,00	ST (Sangat Tinggi)	2,00 – 3,00	T (Tinggi)	1,00 – 2,00	S (Sedang)	0,00 – 1,00	R (Rendah)
NILAI	KATEGORI													
3,00 – 4,00	ST (Sangat Tinggi)													
2,00 – 3,00	T (Tinggi)													
1,00 – 2,00	S (Sedang)													
0,00 – 1,00	R (Rendah)													
		Persentase produk hukum daerah yang harmonis	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kesesuaian antara produk hukum daerah dengan peraturan di atasnya</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang harmonis}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Bagian Hukum</p>										

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	Kategori	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	<p>Alasan : Merupakan indikator makro pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah, sehingga secara praktis dapat mengetahui derajat pendidikan masyarakat Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Keterangan : <i>RLS</i> = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas <i>Xi</i> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun <i>n</i> = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Pusat Statistik Kota Tegal
		Angka Partisipasi Sekolah	Angka	<p>Alasan : Indikator makro pendidikan dan digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $APS\ 7 - 12\ tahun = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				$APS\ 13 - 15\ tahun = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
2.	Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	%	<p>Alasan : Berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang tercatat dan Pokok Pikiran yang difasilitasi Pemerintah}}{\text{Jumlah keseluruhan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pokok Pikiran Kebudayaan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

5. DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah umur dari seluruh kematian pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh kematian pada tahun tertentu}}$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	%	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Keluarga dengan IKS Sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah Keluarga di kunjungi dan di data di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000 / kelahiran hidup	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Formulasi Pengukuran : <i>Jumlah kematian karena kehamilan, persalinan masa nifas atau komplikasi – komplikasinya di suatu wilayah pada periode waktu tertentu</i> $\frac{\text{Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Prevalensi DM	%	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Jumlah penderita DM di suatu wilayah pada periode waktu tertentu</i> $\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun di suatu wilayah}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun di suatu wilayah}} \times 100\%$ pada kurun waktu yang sama</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Prevalensi HIV/AIDs	%	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Insident Rate DBD	100.000 penduduk	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penderita DBD di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Prevalensi Kanker Serviks	1.000 penduduk	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penderita Kanker Serviks di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah wanita usia 30 – 50 tahun di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Prevalensi Kanker Payudara	1.000 penduduk	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penderita Kanker Payudara di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah wanita usia 30 – 50 tahun di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>
		Prevalensi Kusta	10.000 penduduk	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penderita Kusta di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 10.000$</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
		Skor IKM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kategori	<p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p> <p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1375 781 2392 1011"> <thead> <tr> <th data-bbox="1375 781 1542 889">NILAI PERSEPSI</th> <th data-bbox="1547 781 1746 889">NILAI INTERVAL (NI)</th> <th data-bbox="1751 781 1963 889">NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th data-bbox="1968 781 2200 889">MUTU PELAYANAN (x)</th> <th data-bbox="2205 781 2392 889">KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1375 893 1542 919">1</td> <td data-bbox="1547 893 1746 919">1,00 – 2,5996</td> <td data-bbox="1751 893 1963 919">25,00 – 64,99</td> <td data-bbox="1968 893 2200 919">D</td> <td data-bbox="2205 893 2392 919">Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1375 922 1542 948">2</td> <td data-bbox="1547 922 1746 948">2,60 – 3,064</td> <td data-bbox="1751 922 1963 948">65,00 – 76,60</td> <td data-bbox="1968 922 2200 948">C</td> <td data-bbox="2205 922 2392 948">Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1375 951 1542 977">3</td> <td data-bbox="1547 951 1746 977">3,0644 – 3,532</td> <td data-bbox="1751 951 1963 977">76,61 – 88,30</td> <td data-bbox="1968 951 2200 977">B</td> <td data-bbox="2205 951 2392 977">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1375 980 1542 1006">4</td> <td data-bbox="1547 980 1746 1006">3,5324 – 4,00</td> <td data-bbox="1751 980 1963 1006">88,31 – 100,00</td> <td data-bbox="1968 980 2200 1006">A</td> <td data-bbox="2205 980 2392 1006">Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan infrastruktur Perkotaan	Kinerja infrastruktur Dasar Perkotaan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kondisi infrastruktur dasar Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran $\frac{\text{Jumlah infrastruktur Dasar Perkotaan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah infrastruktur}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
		Luas wilayah bebas genangan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui luas wilayah Kota Tegal yang bebas dari genangan / banjir</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Luas wilayah genangan}}{\text{Luas wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
		Cakupan layanan sanitasi	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui cakupan sanitasi ke warga</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terakses air limbah berfungsi baik}}{\text{Jumlah sarpras air limbah}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
		Cakupan layanan air minum	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui cakupan layanan air minum</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah warga yang terlayani air minum perpipaan}}{\text{Total Warga Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
2.	Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah kota	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai Tata Ruang}}{\text{Luas peruntukan Rencana Tata ruang}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase luasan kawasan permukiman layak huni	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui luas permukiman layak huni di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Luas permukiman layak huni di Kota Tegal}}{\text{Total luas wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
		Jumlah Backlog	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\text{Jumlah Backlog} = \text{Jumlah KK} - \text{Jumlah Rumah}$</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Perundang - Undangan Daerah	Persentase berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kondusifitas di masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah gangguan tahun sebelumnya } (n - 1) - \text{Jumlah gangguan tahun berjalan } (n)}{\text{Jumlah gangguan tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : - Satuan Polisi Pamong Praja - Polres Tegal Kota</p>
		Tingkat Kepatuhan terhadap Perundang - Undangan Daerah	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penegakan Perda yang tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : - Satuan Polisi Pamong Praja - Polres Tegal Kota</p>

9. DINAS SOSIAL KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Menurunnya jumlah PMKS	Persentase penurunan jumlah PMKS	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui keberdayaan PMKS yang dibantu dan ditangani</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah PMKS tahun sebelumnya } (n - 1) - \text{Jumlah PMKS tahun sekarang } (n)}{\text{Jumlah PMKS tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Sosial</p>

10. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja dan hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Badan Pusat Statistik Kota Tegal </p>
2.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Persentase penempatan pencari kerja yang dilatih	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan dan pelatihan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang dilatih yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang dilatih}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
3.	Meningkatnya perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui besaran kontribusi sektor perindustrian di Kota Tegal terhadap PDRB Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Perindustrian di Kota Tegal}}{\text{Jumlah PDRB Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Badan Pusat Statistik Kota Tegal

11. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas gizi, ketersediaan dan keamanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui keberagaman pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Menggunakan aplikasi PPH dari Kementerian Pertanian</i></p> <p>Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan</p>
		Ketersediaan pangan utama	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama masyarakat Kota Tegal (beras) dalam periode tahun tertentu</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan utama}}{\text{Jumlah kebutuhan konsumsi penduduk 1 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan</p>
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Pendapatan petani pada tahun tertentu}}{\text{Pengeluaran petani pada tahun tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
2.	Meningkatnya produksi sektor peternakan	Angka prevalensi penyakit zoonosis	%	Alasan : Mencatat kondisi kesehatan hewan Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penyakit zoonosis}}{\text{Populasi hewan}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan
		Jumlah produksi hasil peternakan	Kg	Alasan : Mengukur jumlah produksi dari hasil peternakan Formulasi Pengukuran : <i>Total produksi susu, daging dan telur</i> Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan
3.	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan dan daya saing ekonomi berbasis perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	Alasan : Mengukur tingkat kesejahteraan nelayan Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Indeks harga yang diterima nelayan}}{\text{Indeks harga yang dibayar nelayan}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	Alasan : Mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Indeks harga yang diterima pembudidaya}}{\text{Indeks harga yang dibayar pembudidaya}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	<p>Alasan : Untuk mengetahui gambaran awal kualitas air pada lingkup dan periode tertentu</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IPj = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 R + (\frac{Ci}{Lij})^2 M}{2}}$ <p>Keterangan : IPj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j Ci = Konsentrasi pencemaran kualitas air i Lij = Konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam Baku peruntukan air j M = Maksimum R = Rerata</p> <p>Selanjutnya dilakukan pembobotan dan perhitungan indeks kualitas air berdasarkan hasil indeks pencemarannya</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	<p>Alasan : Untuk mengetahui gambaran awal kondisi kualitas udara pada lingkup dan periode tertentu</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IKU = 100 - [^{50}/_{0,9} \times (Ieu - 0,1)]$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Keterangan :</p> <p>Ieu didapatakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalikan rerata NO2 dari passive sampler dengan variabel eu → 40 2. Mengalikan rerata SO2 dari passive sampler dengan variabel eu → 20 3. Kedua hasil kemudian dirata-rata dan dimasukkan kedalam rumum IKU <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	<p>Alasan : Untuk mengetahui gambaran awal kondisi tutupan lahan pada lingkup dan periode tertentu</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IKTL = 100 - [84,3 - (TH \times 100)] \times 50/54,3$ <p>Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
3.	Meningkatnya kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah dan Limbah B3	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Persentase Penanganan Sampah + Persentase Pengurangan Sampah</i></p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Keterangan :</p> <p>Persentase Penanganan Sampah didapat dari rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga}}{\text{Jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga}} \times 100\%$ <p>Persentase Pengurangan Sampah didapat dari rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga}}{\text{Jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Prosentase Pengelolaan Limbah B3	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui kondisi pengelolaan limbah B3 di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang dikelola}}{\text{Jumlah timbulan limbah B3}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah KTP - el yang terbit}}{\text{Jumlah wajib KTP - el}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk total}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : Jenis dokumen pencatatan sipil : 1. Akta Kelahiran 2. Akta Kematian</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
2.	Meningkatnya Kualitas dan Validasi Data Kependudukan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1348 610 2364 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="1348 610 1515 727">NILAI PERSEPSI</th> <th data-bbox="1515 610 1721 727">NILAI INTERVAL (NI)</th> <th data-bbox="1721 610 1933 727">NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th data-bbox="1933 610 2182 727">MUTU PELAYANAN (x)</th> <th data-bbox="2182 610 2364 727">KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1348 727 1515 756">1</td> <td data-bbox="1515 727 1721 756">1,00 - 2,5996</td> <td data-bbox="1721 727 1933 756">25,00 - 64,99</td> <td data-bbox="1933 727 2182 756">D</td> <td data-bbox="2182 727 2364 756">Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 756 1515 786">2</td> <td data-bbox="1515 756 1721 786">2,60 - 3,064</td> <td data-bbox="1721 756 1933 786">65,00 - 76,60</td> <td data-bbox="1933 756 2182 786">C</td> <td data-bbox="2182 756 2364 786">Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 786 1515 815">3</td> <td data-bbox="1515 786 1721 815">3,0644 - 3,532</td> <td data-bbox="1721 786 1933 815">76,61 - 88,30</td> <td data-bbox="1933 786 2182 815">B</td> <td data-bbox="2182 786 2364 815">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 815 1515 842">4</td> <td data-bbox="1515 815 1721 842">3,5324 - 4,00</td> <td data-bbox="1721 815 1933 842">88,31 - 100,00</td> <td data-bbox="1933 815 2182 842">A</td> <td data-bbox="2182 815 2364 842">Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																									

14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN										
1.	Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak dan terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	<p>Alasan : Untuk mengetahui komitmen dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam program dan kegiatan</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1550 667 2153 938"> <thead> <tr> <th data-bbox="1550 667 1679 721">NO.</th> <th data-bbox="1679 667 2153 721">KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1550 721 1679 774">1</td> <td data-bbox="1679 721 2153 774">Pratama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 774 1679 828">2</td> <td data-bbox="1679 774 2153 828">Utama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 828 1679 881">3</td> <td data-bbox="1679 828 2153 881">Madya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 881 1679 935">4</td> <td data-bbox="1679 881 2153 935">Mentor</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	NO.	KATEGORI	1	Pratama	2	Utama	3	Madya	4	Mentor
NO.	KATEGORI												
1	Pratama												
2	Utama												
3	Madya												
4	Mentor												
		Predikat Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	<p>Alasan : Untuk mengetahui komitmen dan upaya mewujudkan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak</p>										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN										
			<p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1550 334 2153 607"> <thead> <tr> <th data-bbox="1550 334 1679 388">NO.</th> <th data-bbox="1679 334 2153 388">KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1550 388 1679 441">1</td> <td data-bbox="1679 388 2153 441">Pratama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 441 1679 495">2</td> <td data-bbox="1679 441 2153 495">Madya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 495 1679 548">3</td> <td data-bbox="1679 495 2153 548">Nindya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1550 548 1679 602">4</td> <td data-bbox="1679 548 2153 602">Utama</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	NO.	KATEGORI	1	Pratama	2	Madya	3	Nindya	4	Utama
NO.	KATEGORI												
1	Pratama												
2	Madya												
3	Nindya												
4	Utama												
		Laju Pertumbuhan penduduk	<p>Alasan : Untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $Pt = Po + (L - M)$ $\% = \left(\frac{L - M}{Po} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Pt = Jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan Po = Jumlah penduduk di tahun awal perhitungan L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian % = Persentase pertumbuhan penduduk</p> <p>Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
2.	Terkendalinya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	<p>Alasan : Untuk mengetahui jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya atau jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $TFR = \frac{JK15 - 49}{JP15 - 49} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>TFR = Total Fertility Rate JK15 - 49 = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 14 - 59 tahun selama periode tertentu JP15 - 49 = Jumlah penduduk perempuan umur 15 - 49 tahun pada periode yang sama</p> <p>Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

15. DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Bidang Perhubungan	Persentase pengguna moda transportasi umum	%	<p>Alasan : Proporsi dari penduduk yang menggunakan angkutan umum pada suatu daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Persentase pengguna moda angkutan umum}}{\text{Jumlah penduduk Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Perhubungan</p>

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																		
1.	Tercapainya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian melalui pengisian kuesioner penilaian mandiri yang merupakan penjumlahan dari 3 variabel, yaitu: website, konten informasi publik (informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat dan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan), serta kelembagaan</p> <table border="1" data-bbox="1672 824 2220 1133"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tidak Informatif</td> <td>< 39,9</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kurang Informatif</td> <td>40 – 59,9</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cukup Informatif</td> <td>60 – 79,9</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Menuju Informatif</td> <td>80 – 89,9</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Informatif</td> <td>90 – 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisi Informasi Pusat - Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah - Dinas Komunikasi dan Informatika 	NO.	KATEGORI	NILAI	1.	Tidak Informatif	< 39,9	2.	Kurang Informatif	40 – 59,9	3.	Cukup Informatif	60 – 79,9	4.	Menuju Informatif	80 – 89,9	5.	Informatif	90 – 100
NO.	KATEGORI	NILAI																				
1.	Tidak Informatif	< 39,9																				
2.	Kurang Informatif	40 – 59,9																				
3.	Cukup Informatif	60 – 79,9																				
4.	Menuju Informatif	80 – 89,9																				
5.	Informatif	90 – 100																				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																		
2.	Tercapainya sistem pemerintahan Kota Tegal yang berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE	Nilai	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian dari pengisian Indeks SPBE yang terdiri dari 3 domain, yaitu: Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE, dan Indeks Domain Layanan SPBE</p> <table border="1" data-bbox="1679 721 2205 1029"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4,2 – 5</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	NO.	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1.	4,2 – 5	Memuaskan	2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3.	2,6 – < 3,5	Baik	4.	1,8 – < 2,6	Cukup	5.	< 1,8	Kurang
NO.	NILAI INDEKS	PREDIKAT																				
1.	4,2 – 5	Memuaskan																				
2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																				
3.	2,6 – < 3,5	Baik																				
4.	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5.	< 1,8	Kurang																				
3.	Terwujudnya walidata Informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang mudah diakses	%	<p>Alasan : Urusan Pemerintahan Statistik Sektoral merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota</p>																		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah urusan sektoral yang terpublikasi melalui internet}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
4.	Terwujudnya pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</p> <p>Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian menggunakan Indeks Keamanan Informasi yang terdiri atas 7 area: kategori sistem elektronik, tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi dan suplemen. Hasil penilaian dikategorikan dalam 4 status kesiapan, yaitu: tidak layak, pemenuhan kerangka kerja dasar (PKKD), cukup baik dan baik, yang disesuaikan dengan kategori sistem elektronik yang diamankan.</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Siber dan Sandi Negara - Dinas Komunikasi dan Informatika

17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil	Aktivasi koperasi Non Aktif/ Koperasi Baru	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui pertumbuhan koperasi aktif (koperasi yang berasal dari aktivasi koperasi tidak aktif atau dari pendirian koperasi baru)</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Selisih jumlah koperasi } [n - (n - 1)]}{\text{Jumlah Total Koperasi Tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan</p>
		Pertumbuhan usaha mikro kecil	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan jumlah usaha mikro kecil</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Selisih jumlah Usaha Mikro Kecil } [n - (n - 1)]}{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil Tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan</p>
2.	Meningkatnya Sektor Perdagangan/ Jasa Dalam Perekonomian Daerah	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui peningkatan pendapatan Sektor Perdagangan di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Selisih jumlah PAD sektor perdagangan } [n - (n - 1)]}{\text{Jumlah PAD sektor perdagangan sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan</p>

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Meningkatkan nilai investasi	Realisasi Investasi	Rp. T	<p>Alasan : Untuk mengetahui capaian realisasi investasi di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Jumlah investasi pada tahun berjalan</i></p> <p>Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>																									
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									

19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Persentase Wirausaha Muda	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui cakupan pemuda yang memanfaatkan peluang usaha di Kota Tegal melalui kewirausahaan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Pemuda Kota Tegal yang berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata</p>
		Persentase Partisipasi pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan di Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan}}{\text{Jumlah pemuda Kota Tegal}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata</p>
2.	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Persentase cabang olah raga berprestasi	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui cabang olah raga yang mempunyai prestasi</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga berprestasi}}{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina Disporapar dan KONI}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : Prestasi minimal Tingkat Provinsi</p> <p>Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
3.	Meningkatnya kinerja pariwisata sebagai sumber perekonomian masyarakat	Kunjungan Wisatawan	Orang/ tahun	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Jumlah Kunjungan Wisata tahun berjalan</i></p> <p>Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata</p>

20. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN																		
1.	Tercapainya indeks kearsipan yang optimal	Indeks Kearsipan	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan</p> <p>Formulasi Pengukuran : <i>Hasil Audit Eksternal oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NILAI</th> <th>KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>91 - 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>76 - 90</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>61 - 75</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>51 - 60</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>≤ 50</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>	NO.	NILAI	KATEGORI	1.	91 - 100	Sangat Baik	2.	76 - 90	Baik	3.	61 - 75	Cukup	4.	51 - 60	Kurang	5.	≤ 50	Buruk
NO.	NILAI	KATEGORI																			
1.	91 - 100	Sangat Baik																			
2.	76 - 90	Baik																			
3.	61 - 75	Cukup																			
4.	51 - 60	Kurang																			
5.	≤ 50	Buruk																			
2.	Tercapainya Standar Nasional Perpustakaan yang optimal	Standar Nasional Perpustakaan	<p>Alasan : Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota 																		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN																				
			<p>Formulasi Pengukuran : <i>Akreditasi Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional</i></p> <table border="1" data-bbox="1315 394 2277 589"> <thead> <tr> <th data-bbox="1315 394 1405 435">NO.</th> <th data-bbox="1405 394 1771 435">PREDIKAT</th> <th data-bbox="1771 394 1978 435">PENILAIAN</th> <th data-bbox="1978 394 2277 435">RENTANG NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1315 435 1405 475">1.</td> <td data-bbox="1405 435 1771 475">Akreditasi A</td> <td data-bbox="1771 435 1978 475">Baik Sekali</td> <td data-bbox="1978 435 2277 475">91 ≤ NA ≤ 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1315 475 1405 516">2.</td> <td data-bbox="1405 475 1771 516">Akreditasi B</td> <td data-bbox="1771 475 1978 516">Baik</td> <td data-bbox="1978 475 2277 516">76 ≤ NA ≤ 90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1315 516 1405 557">3.</td> <td data-bbox="1405 516 1771 557">Akreditasi C</td> <td data-bbox="1771 516 1978 557">Cukup</td> <td data-bbox="1978 516 2277 557">60 ≤ NA ≤ 75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1315 557 1405 589">4.</td> <td data-bbox="1405 557 1771 589">Belum Terakreditasi</td> <td data-bbox="1771 557 1978 589">Kurang</td> <td data-bbox="1978 557 2277 589">NA < 60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>	NO.	PREDIKAT	PENILAIAN	RENTANG NILAI	1.	Akreditasi A	Baik Sekali	91 ≤ NA ≤ 100	2.	Akreditasi B	Baik	76 ≤ NA ≤ 90	3.	Akreditasi C	Cukup	60 ≤ NA ≤ 75	4.	Belum Terakreditasi	Kurang	NA < 60
NO.	PREDIKAT	PENILAIAN	RENTANG NILAI																				
1.	Akreditasi A	Baik Sekali	91 ≤ NA ≤ 100																				
2.	Akreditasi B	Baik	76 ≤ NA ≤ 90																				
3.	Akreditasi C	Cukup	60 ≤ NA ≤ 75																				
4.	Belum Terakreditasi	Kurang	NA < 60																				

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran Daerah	%	<p>Alasan : Dalam rangka konsistensi program RKPD ke dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berjalan}}{\text{Jumlah program APBD tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi program RKPD dengan RPJMD	%	<p>Alasan : Dalam rangka konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berjalan}}{\text{Jumlah program RPJMD tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
3.	Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Tingkat implementasi dokumen kelitbangan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah dokumen kelitbangan yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>

22. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui rasio PAD terhadap APBD Kota Tegal</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>
2.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD (Tepat waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0)	Angka	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 disebutkan bahwa :</p> <p>(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.</p> <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan posisi kas daerah (Tepat waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0)	Angka	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dan Bentuk Non Tunai</p> <p>Formulasi Pengukuran : Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/ PMK.07/ 2016 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dan Bentuk Non Tunai Pasal 7 disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas : Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.</p> <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (Tepat waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0)	Angka	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 Ayat (2) disebutkan bahwa :</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				<p>“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.</p> <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>
3.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah	Prosentase barang milik daerah yang masih harus diinventarisir		<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang masih harus diinventarisir}}{\text{Total barang milik daerah}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Badan Keuangan Daerah</p>

23. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks	<p>Alasan : Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI</th> <th>INDEKS</th> <th>SEBUTAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>IV</td> <td>325 – 400</td> <td>0,81 – 1</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>III</td> <td>250 – 324</td> <td>0,61 – 0,8</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>II</td> <td>175 – 249</td> <td>0,41 – 0,6</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>I</td> <td>100 – 174</td> <td>0,2 – 0,4</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</p>	NO.	KATEGORI	NILAI	INDEKS	SEBUTAN	1.	IV	325 – 400	0,81 – 1	Sangat Baik	2.	III	250 – 324	0,61 – 0,8	Baik	3.	II	175 – 249	0,41 – 0,6	Kurang	4.	I	100 – 174	0,2 – 0,4	Buruk
NO.	KATEGORI	NILAI	INDEKS	SEBUTAN																									
1.	IV	325 – 400	0,81 – 1	Sangat Baik																									
2.	III	250 – 324	0,61 – 0,8	Baik																									
3.	II	175 – 249	0,41 – 0,6	Kurang																									
4.	I	100 – 174	0,2 – 0,4	Buruk																									

24. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN						
1.	Terwujudnya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan	Indeks Ketahanan Daerah	<p>Alasan : Untuk monitoring dan evaluasi pencapaian ketahanan daerah berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="1380 626 2325 1268"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1380 626 1522 776">Level 1</td> <td data-bbox="1522 626 2325 776">Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1380 776 1522 967">Level 2</td> <td data-bbox="1522 776 2325 967">Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadic yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1380 967 1522 1268">Level 3</td> <td data-bbox="1522 967 2325 1268">Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belummenyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.</td> </tr> </tbody> </table>	Level 1	Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.	Level 2	Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadic yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.	Level 3	Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belummenyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
Level 1	Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.								
Level 2	Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadic yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.								
Level 3	Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belummenyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.								

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN				
			<table border="1" data-bbox="1380 334 2322 743"> <tr> <td data-bbox="1380 334 1515 630">Level 4</td> <td data-bbox="1515 334 2322 630">Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1380 630 1515 743">Level 5</td> <td data-bbox="1515 630 2322 743">Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintah.</td> </tr> </table> <p data-bbox="1380 760 2322 841">Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	Level 4	Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.	Level 5	Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintah.
Level 4	Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.						
Level 5	Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintah.						
2.	Meningkatnya Tata Kelola kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	<p data-bbox="1380 889 2322 922">Alasan :</p> <p data-bbox="1380 938 2322 971">Untuk monitoring Indeks Risiko Bencana berdasarkan :</p> <ul data-bbox="1380 987 2322 1123" style="list-style-type: none"> - Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana <p data-bbox="1380 1140 2322 1172">Formulasi Pengukuran :</p> $R = H \times \frac{V}{C}$ <p data-bbox="1380 1269 2322 1302">Keterangan :</p> <p data-bbox="1380 1318 2322 1351">R = <i>Disaster Risk</i> / Risiko Bencana</p> <p data-bbox="1380 1367 2322 1448">H = <i>Hazard Threat</i> / Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu</p>				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			<p>V = <i>Vulnerability</i> / Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana</p> <p>C = <i>Adaptive Capacity</i> / Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu</p> <p>Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

25. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik	Potensi konflik sosial teratasi	%	<p>Alasan : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosial teratasi}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p>

26. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit	Skor IKM RSUD Kardinah	Kategori	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Tingkat Akreditasi	<p>Alasan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TINGKAT AKREDITASI</th> <th>PERSYARATAN MINIMUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat Dasar</td> <td>- 4 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 11 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%</td> </tr> </tbody> </table>	TINGKAT AKREDITASI	PERSYARATAN MINIMUM	Tingkat Dasar	- 4 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 11 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%																					
TINGKAT AKREDITASI	PERSYARATAN MINIMUM																												
Tingkat Dasar	- 4 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 11 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%																												

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN						
				<table border="1" data-bbox="1360 329 2382 678"> <tr> <td data-bbox="1360 329 1664 467">Tingkat Madya</td> <td data-bbox="1664 329 2382 467">- 8 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 7 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1360 467 1664 605">Tingkat Utama</td> <td data-bbox="1664 467 2382 605">- 12 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 3 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1360 605 1664 678">Tingkat Paripurna</td> <td data-bbox="1664 605 2382 678">15 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1360 691 1639 724">Bab yang dinilai :</p> <ol data-bbox="1360 735 2262 1295" style="list-style-type: none"> 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 3. Asesmen Pasien (AP) 4. Pelayanan Pasien (PP) 5. Penilaian Anestesi dan Bedah (PAB) 6. Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) 9. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 10. Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) 11. Manajemen Kualitas Pelayanan 12. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) 13. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 14. Sasaran Keselamatan Pasien RS 15. <i>Millenium Developmnet Goal's</i> (MDG's) <p data-bbox="1360 1307 1597 1339">Sumber Data :</p> <p data-bbox="1360 1351 1971 1383">Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah</p>	Tingkat Madya	- 8 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 7 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%	Tingkat Utama	- 12 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 3 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%	Tingkat Paripurna	15 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80%
Tingkat Madya	- 8 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 7 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%									
Tingkat Utama	- 12 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80% - 3 Bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap Bab harus 20%									
Tingkat Paripurna	15 Bab digolongkan Major, nilai minimum setiap Bab harus 80%									

27. KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan pada wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$ </p> <p>Keterangan : Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek : 1. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 2. Administrasi Kependudukan 3. Administrasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Timur</p>																									
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Timur</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									

28. KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tegal Barat	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan pada wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek : 1. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 2. Administrasi Kependudukan 3. Administrasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Barat</p>																									
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Barat</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									


29. KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																									
1.	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan pada wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$ </p> <p>Keterangan : Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek : 1. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 2. Administrasi Kependudukan 3. Administrasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Selatan</p>																									
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Kecamatan Tegal Selatan</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																									

30. KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN															
1.	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Margadana	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	<p>Alasan : Untuk mengetahui tingkat ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan pada wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek : 1. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 2. Administrasi Kependudukan 3. Administrasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Sumber Data : Kecamatan Margadana</p>															
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Alasan : Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (x)															
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik															
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik															

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN																
				<table border="1" data-bbox="1353 347 2369 407"> <tr> <td data-bbox="1353 347 1515 375">3</td> <td data-bbox="1515 347 1739 375">3,0644 - 3,532</td> <td data-bbox="1739 347 1938 375">76,61 - 88,30</td> <td data-bbox="1938 347 2021 375">B</td> <td colspan="2" data-bbox="2021 347 2369 375">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1353 375 1515 407">4</td> <td data-bbox="1515 375 1739 407">3,5324 - 4,00</td> <td data-bbox="1739 375 1938 407">88,31 - 100,00</td> <td data-bbox="1938 375 2021 407">A</td> <td colspan="2" data-bbox="2021 375 2369 407">Sangat Baik</td> </tr> </table> <p data-bbox="1353 423 1719 505">Sumber Data : Kecamatan Margadana</p>					3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik		4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																

WALIKOTA TEGAL,

 DEDY YGN SUPRIYONO